

**EVALUASI PROGRAM MOTORISASI PERIKANAN DALAM
PEMBERIAN BANTUAN UNTUK PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DI
KABUPATEN LINGGA TAHUN 2014
(Studi Pada Bantuan Mesin Robin di Desa Tanjung Lipat)**

NASKAH PUBLIKASI



Oleh

**MARDI
KUSTIAWAN
N.A DWI PUTRI**

**PROGRAM STUDI ILMU PEMERINTAHAN
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS MARITIM RAJA ALI HAJI
TANJUNGPINANG
2017**

SURAT PERSETUJUAN DOSEN PEMBIMBING

Yang bertanda tangan dibawah ini adalah Dosen Pembimbing Skripsi mahasiswa yang disebut dibawah ini :

Nama : MARDI
NIM : 110565201170
Jurusan/ Prodi : Ilmu Pemerintahan
Alamat : Jl. Sei. Jang Kota Tanjungpinang
Nomor Telp : 081270103776
Email : mardi_boy93@yahoo.com
Judul Naskah : Evaluasi Program Motorisasi Perikanan Dalam Pemberian Bantuan Untuk Pemberdayaan Masyarakat Di Kabupaten Lingga Tahun 2014 (Studi Pada Bantuan Mesin Robin Di Desa Tanjung Lipat)

Menyatakan bahwa judul tersebut sudah sesuai dengan aturan tata tulis naskah ilmiah dan untuk dapat diterbitkan.

Tanjungpinang, 10 Februari 2017
Yang menyatakan,

Dosen Pembimbing I

Dosen Pembimbing II

Kustiawan, M.Pol.,Sc
NIDN. 0507097301

N.A Dwi Putri., S.IP.,M.Si
NIP. 198707182014042001

**EVALUASI PROGRAM MOTORISASI PERIKANAN DALAM PEMBERIAN BANTUAN
UNTUK PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DI KABUPATEN LINGGA TAHUN 2014
(Studi Pada Bantuan Mesin Robin di Desa Tanjung Lipat)**

**MARDI
KUSTIAWAN
N.A DWI PUTRI**

Program Studi Ilmu Pemerintahan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Universitas Maritim Raja Ali Haji

ABSTRAK

Jika dilihat secara umum masyarakat di Desa Tanjung lipat masih banyak yang menggunakan alat tangkap tradisional. Hal ini diasumsikan bahwa bantuan pemerintah yang diberikan belum merata, karena dari jumlah nelayan yang ada didesa tanjung lipat ini berjumlah 141 nelayan. Kemudian yang memenuhi kriteria calon yang mendapatkan bantuan ini sejumlah 95 nelayan. yang mendapatkan bantuan tersebut berjumlah 21 nelayan, 74 nelayan lainnya belum mendapatkan bantuan tersebut.

Penelitian ini adalah penelitian Deskriptif kualitatif, dalam penelitian deskriptif ini, penelitian hanya memberikan suatu gambaran secara sistematis, faktual dan akurat mengenai fakta-fakta yang sesuai dengan ruang lingkup judul penelitian. Jenis data yang digunakan dalam melakukan penelitian ini adalah data Primer dan data Skunder

Pemberian bantuan mesin robin sudah berjalan cukup efektif, dilihat dari indikator:1. nelayan sudah tidak menggunakan tenaga dan layar lagi sudah beralih memakai mesin robin ini 2. Waktu dan jarak jangkauan relatif singkat dari sebelumnya. 3. Penghasilan sedikit meningkat dari sebelumnya. Namun dalam penyaluran bantuan ini tidak efisien karena tidak adanya kegiatan lain dari pemerintah yang menunjang keberhasilan bantuan ini, seperti bimbingan teknis terhadap nelayan. sehingga masih ada beberapa bantuan yang diberikan cepat rusak dan tidak dimanfaatkan dengan semaksimal mungkin. Sedangkan dari kriteria kecukupan sudah berjalan tepat sasaran yang menerima bantuan ini memang masyarakat yang memenuhi kriterianya masing-masing. Dan dari kriteria perataan dan ketepatan jumlah bantuan yang diberikan memang belum sesuai dengan verifikasi yang dilakukan dikarenakan masalah dana. kehidupan sosial masyarakat tidak dapat langsung berubah walaupun adanya program bantuan mesin robin ini, memang perlu dilakukan perubahan sosial di masyarakat yang nantinya akan menjadi suatu penguatan sosial dalam usaha mengatasi masyarakat miskin yang ada di desa Tanjung lipat.

Kata Kunci : Pemberdayaan , Masyarakat, Nelayan

ABSTRACT

If viewed in the general community in the village of Tanjung Lipat still many who use traditional fishing gear. It is assumed that a given government assistance has not been evenly distributed, because of the number of fishermen's village cape folding totaled 141 fishermen. Then eligible candidates who get this assistance totaling 95 fishermen. have this support amounted to 21 fishermen, 74 other fishermen do not have this support.

This study is a qualitative descriptive study, in this descriptive study, Researchers only provides a systematic overview factual and accurate about the facts in accordance with the scope of the title of the study. Data used in this research is data Primary and Secondary Data.

Providing assistance robin engine has been running quite effective. seen from the indicators: 1. The fishermen are not using power and screen more were turning to use this machine robin. 2. Time and distance relatively short range of the previous. 3. Income increased slightly from the previous. But in the distribution of aid is not efficient because of the absence of other activities of the government of the success of this aid, technical guidance to fishermen. so there are still some help given quickly broken and not being utilized to the fullest. While the criteria of adequacy has been running well targeted to receive assistance is indeed people who meet its criteria each. And of criteria leveling and precision the amount of aid granted is not in accordance with the verification conducted due to funding problems. social life can not directly change even if the program's assistance robin machine, indeed necessary social changes in society that will become a social reinforcement in an effort to empower the needy in the village Tanjung Lipat.

Keywords : Empowerment, Community, Fishermen

A. PENDAHULUAN

Memberdayakan masyarakat pesisir berarti menciptakan peluang bagi masyarakat pesisir untuk menentukan kebutuhannya, merencanakan dan melaksanakan kegiatannya, yang akhirnya menciptakan kemandirian permanen dalam kehidupan masyarakat itu sendiri. (Soetomo: 2011: 25). Memberdayakan masyarakat pesisir tidaklah seperti memberdayakan kelompok-kelompok masyarakat lainnya, Karena didalam habitat pesisir terdapat banyak kelompok kehidupan masyarakat diantaranya, masyarakat nelayan tangkap, adalah kelompok masyarakat pesisir yang mata pencaharian utamanya adalah menangkap ikan dilaut. Kelompok ini dibagi lagi dalam dua kelompok besar, yaitu nelayan tangkap modern dan nelayan tangkap tradisional. Keduanya kelompok ini dapat dibedakan dari jenis kapal/peralatan yang digunakan dan jangkauan wilayah tangkapannya.

Masyarakat nelayan pengumpul/bakul, adalah kelompok masyarakat pesisir yang bekerja disekitar tempat pendaratan dan pelelangan ikan. Mereka akan mengumpulkan ikan-ikan hasil tangkapan baik melalui pelelangan maupun dari sisa ikan yang tidak terlelang yang selanjutnya dijual ke masyarakat sekitarnya atau dibawah ke pasar-pasar lokal.

Pemerintah melakukan beberapa upaya untuk memberdayakan masyarakat, seperti pengadaan sarana dan prasarana pendukung untuk nelayan, sasaran kelompok nelayan tersebut adalah meningkatkan produksi

tangkap hal ini tentu saja akan mendorong pertumbuhan ekonomi masyarakat juga dapat memanfaatkan sumberdaya alam kelautan, yang mana perairan adalah bagian terbesar wilayah di nusantara. Dengan demikian, diantara lapisan masyarakat yang perlu mendapat perhatian khususnya pemerintah daerah dalam program pemberdayaan masyarakat adalah kelompok masyarakat pesisir dengan memberdayakan perekonomiannya. Masyarakat yang tinggal pesisir pantai di wilayah nusantara merupakan salah satu kelompok masyarakat terbesar mengingat bahwa wilayah Indonesia yang terdiri dari banyak pulau, yang mana pada umumnya memiliki mata pencaharian sebagai nelayan untuk memenuhi kebutuhan hidupnya.

Sesuai dengan Peraturan Menteri Kelautan Dan Perikanan Republik Indonesia Nomor Per. 12 /men/2008 tentang bantuan langsung masyarakat bidang kelautan dan perikanan dijelaskan bahwa guna lebih memberdayakan masyarakat bidang kelautan dan perikanan karena adanya penurunan kualitas hidupnya, maka dipandang perlu memberikan bantuan langsung kepada masyarakat bidang kelautan dan perikanan, salah satu program untuk masyarakat pesisir adalah program pengentasan kemiskinan. Melalui program pengentasan kemiskinan (taskin) mendapat bantuan alat tangkap. Bantuan langsung masyarakat bidang kelautan dan perikanan adalah bantuan yang diberikan kepada masyarakat atau lembaga kemasyarakatan termasuk lembaga non pemerintah bidang pendidikan secara

selektif, tidak terus menerus baik berupa barang, uang atau jasa yang bertujuan untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat bidang kelautan dan perikanan. Dana bergulir taskin senilai Rp 3,2 miliar, yang bersumber dari Dinas kelautan dan perikanan Provinsi kepulauan riau tersebut disalurkan melalui Dinas Kelautan dan Perikanan (DKP) Kabupaten Lingga. Adapun Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Riau no 4 tahun 2011 Tentang Organisasi dan Tata Kerja, Sekretariat DPRD dan Dinas Daerah Provinsi Kepulauan Riau. Menejelaskan Tugas pokok dan Fungsi Dinas Kelautan dan Perikanan.

1. Dinas Kelautan dan Perikanan mempunyai fungsi dan Tugas melaksanakan sebagian kewenangan Desentralisasi, tugas Dekonsentrasi dan tugas pembantuan di bidang kelautan dan perikanan sesuai dengan lingkup tugasnya.
2. Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Dinas Kelautan dan Perikanan mempunyai fungsi:
 - a. Pengelolaan kegiatan kesetaraan, meliputi perencanaan dan evaluasi, keuangan dan kepegawaian;
 - b. Penyusunan program dibidang kelautan dan perikanan;
 - c. Perumusan kebijakan teknis, fasilitas, koordinasi serta pembinaan teknis di bidang pengelolaan sumber daya kelautan dan perikanan;

- d. Perumusan kebijakan teknis, fasilitas, koordinasi serta pembinaan teknis di bidang perikanan budidaya;
- e. Perumusan kebijakan teknis , fasilitas, koordinasi serta pembinaan teknis di bidang perikanan tangkap;
- f. Perumusan kebijakan teknis, fasilitas, koordinasi serta pembinaan teknis di bidang usaha kelautan dan perikanan;
- g. Pelaksanaan pemberian perijinan dan pelayanan umum di bidang kelautan dan perikanan;
- h. Penyelenggaraan pengawasan dan pengendalian di bidang kealautan dan perikanan;
- i. Pembinaan di bidang unit pelaksana teknis dinas dalam lingkup tugasnya; dan
- j. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh gubernur.

Dari uraian diatas bahwasannya program bantuan alat tangkap ini mengacu pada tugas pokok dan fungsi dari Dinas kelautan dan Perikanan. Adapun ragam permintaan bantuan oleh para nelayan tersebut, seperti sampan biasa, alat tangkap jaring, bubu, pancing, dan mesin robin dan lain sebagainya yang memang menjadi kebutuhan masyarakat. Sesuai yang diusulkan masyarakat dalam proposal.

Mata pencaharian di Lingga didominasi oleh kegiatan nelayan dengan tenaga kerja sebanyak 4.688 jiwa (42,68 %) dan kegiatan pertanian (petani, peternak,

perkebunan) dengan tenaga kerja sebanyak 1.687 jiwa (28,16 %). Mata pencaharian lainnya (seperti pedagang, buruh industri, pegawai negeri dan lainlain) hanya 29,17 % dari jumlah tenaga kerja. (Sumber : Statistik Kabupaten Lingga, 2014). Desa Tanjung lipat merupakan salah satu wilayah kelurahan di Lingga yang penduduknya cukup banyak yang berprofesi sebagai nelayan sehingga dengan demikian sangat membutuhkan adanya program pemerintah yang secara nyata dapat menggerakkan ekonomi masyarakat pada sektor perikanan. Saat ini para nelayan sangat mengharapkan adanya bantuan dari pemerintah lewat program-program yang ada.

Pemerintah provinsi kepulauan riau mengusahakan program motorisasi perikanan dalam bentuk armada dan alat penangkapan ikan yaitu dengan pengentasan perahu layar sehingga nelayan berangsur-angsur mengganti penggunaan perahu dengan mesin robin dan mesin tempel, dengan demikian jangkauan operasi penangkapan menjadi lebih jauh sehingga akan berkorelasi positif terhadap peningkatan hasil tangkapan ikan. Program modernisasi armada dan alat penangkapan ini didukung dengan pendanaan APBD Provinsi Kepulauan riau yang diserahkan langsung dalam bentuk barang kepada Pemerintah Kabupaten lingga sebagai instansi pemerintah yang membantu menyelenggarakan dalam penyaluran bantuan ini kemudian diserahkan kepada masing-masing kelompok yang diawasi langsung dari instansi terkait pemerintah

desa yang bertanggung jawab dalam penyerahan bantuan tersebut untuk bantuan mesin robin ini. Dalam kriteria masyarakat nelayan yang mendapatkan bantuan ini memang harus pekerjaannya sebagai nelayan yang memiliki sampan kemudian belum pernah mendapatkan bantuan mesin robin ini baik dari Kota, Kabupaten maupun dari Provinsi, kemudian tidak memindahkan atau menjual bantuan tersebut.

Program ini sudah berjalan pada tahun 2013 sampai 2015. Para nelayan melakukan pekerjaan ini dengan tujuan memperoleh pendapatan untuk melangsungkan kehidupannya. Sedangkan dalam pelaksanaannya dibutuhkan beberapa perlengkapan dan juga dipengaruhi oleh beberapa faktor dalam guna mendukung keberhasilan kegiatannya.

Faktor yang mempengaruhi pendapatan nelayan meliputi faktor sosial dan ekonomi yang terdiri dari modal, jumlah perahu, pengalaman melaut, jarak tempuh melaut, jumlah tenaga kerja. Dengan demikian pendapatan nelayan berdasarkan besar kecilnya volume tangkapan masih terdapat beberapa faktor yang terpenting adalah alat tangkap yang dimiliki serta kapal yang digunakan. Karena kapal yang digunakan akan menentukan kecepatan dan jarak yang bisa di tempuh oleh para nelayan.

Jika dilihat secara umum masyarakat di Desa Tanjung lipat masih banyak yang menggunakan alat tangkap tradisional. Hal ini diasumsikan bahwa bantuan pemerintah yang diberikan belum merata, karena dari jumlah nelayan yang ada didesa tanjung

lipat ini berjumlah 141 nelayan. Kemudian yang memenuhi kriteria calon yang mendapatkan bantuan ini sejumlah 95 nelayan. yang mendapatkan bantuan tersebut berjumlah 21 nelayan, 74 nelayan lainnya belum mendapatkan bantuan tersebut.

Sehingga dalam penelitian ini peneliti merumuskan permasalahan penelitian yang harus dijawab dalam penelitian ini yaitu :

➤ Bagaimana Evaluasi Program motorisasi perikanan dalam pemberian bantuan untuk Pemberdayaan Masyarakat di Kabupaten Lingga Tahun 2014 (Studi Pada Bantuan Mesin Robin di Desa Tanjung Lipat) ? Adapun yang menjadi tujuan dalam penelitian ini adalah :

➤ Untuk mengetahui evaluasi Program motorisasi perikanan dalam pemberian bantuan untuk Pemberdayaan Masyarakat di Kabupaten Lingga Tahun 2014 (Studi Pada Bantuan Mesin Robin di Desa Tanjung Lipat) Hasil penelitian ini diharapkan akan bermanfaat untuk :

- a. Secara praktis, penelitian ini diharapkan dapat mengembangkan ilmu pengetahuan pada bidang ilmu pemerintahan khususnya dalam memberdayakan masyarakat nelayan.
- b. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran bagi masyarakat Desa Tanjung Lipat khususnya masyarakat nelayan, serta pihak Dinas Kelautan dan Perikanan dalam Pemberdayaan masyarakat

nelayan, sekaligus bahan pertimbangan dalam penentuan kebijakan selanjutnya

- c. Secara Akademis, untuk memperoleh gelar sarjana pada program studi Ilmu Pemerintahan, di Universitas Maritim Raja Haji Tanjungpinang.

B. LANDASAN TEORI

1. Kebijakan

Jenis-Jenis Kebijakan Jenis kebijakan publik menurut James Anderson sebagaimana dikutip Suharno (2010: 24-25) menyampaikan kategori kebijakan publik sebagai berikut:

1. *Substantive and Procedural Policies.* *Substantive Policy* adalah Suatu kebijakan dilihat dari substansi masalah yang dihadapi oleh pemerintah. *Procedural Policy* Suatu kebijakan dilihat dari pihak-pihak yang terlibat dalam perumusannya (*Policy Stakeholders*).
2. *Distributive, Redistributive, and Regulatory Policies.* *Distributive Policy* adalah suatu kebijakan yang mengatur tentang pemberian pelayanan/keuntungan kepada individu-individu, kelompok-kelompok, atau perusahaan-perusahaan. *Redistributive Policy* adalah Suatu kebijakan yang mengatur tentang pemindahan alokasi kekayaan, pemilikan, atau hak-hak. *Regulatory Policy* yaitu suatu kebijakan yang mengatur tentang pembatasan/pelarangan terhadap perbuatan/ tindakan.

3. *Material Policy*. Suatu kebijakan yang mengatur tentang pengalokasian/penyediaan sumber-sumber material yang nyata bagi penerimanya.
4. *Public Goods and Private Goods Policies*. *Public Goods Policy* adalah suatu kebijakan yang mengatur tentang penyediaan barang-barang/pelayanan-pelayanan oleh pemerintah, untuk kepentingan orang *Private Goods Policy* yaitu suatu kebijakan yang mengatur tentang penyediaan barang-barang/pelayanan oleh pihak swasta, untuk kepentingan individu-individu (perorangan) di pasar bebas, dengan imbalan biaya tertentu.

Pemerintah sebagai pelaku utama implementasi kebijakan publik memiliki dua fungsi menurut Widodo (2013:43) yakni fungsi politik dan fungsi administratif. Fungsi politik terkait dengan fungsi pemerintah sebagai pembuat kebijakan, sedangkan fungsi administrasi terkait dengan fungsi pemerintah sebagai pelaksana kebijakan. Oleh karena itu, pemerintah sebagai lembaga pembuat dan pelaksana kebijakan publik memiliki kekuatan diskretif (*discretionary power*) dalam pembuatan dan pelaksanaan kebijakan tersebut. Oleh karena itu, aktor-aktor lain juga harus memainkan peran pengawasan dalam pelaksanaan kebijakan tersebut.

Sebuah kebijakan publik akan disusun berdasarkan sebuah proses sebagai berikut:

identifikasi, formulasi, adopsi, implementasi dan evaluasi. Dalam proses identifikasi, pemerintah merasakan adanya masalah yang harus diselesaikan dengan pembuatan kebijakan. Berdasarkan identifikasi tersebut dilakukanlah formulasi kebijakan. Kebijakan disusun berdasarkan alternatif-alternatif tindakan dan partisan. Setelah alternatif tindakan dan partisipan disusun, maka proses adopsi dilakukan dengan memilih alternatif terbaik dengan memperhatikan syarat pelaksanaan, partisipan, proses dan muatan kebijakan. Tahap selanjutnya adalah implementasi kebijakan. Implementasi kebijakan terkait dengan pihak-pihak yang terlibat, tindakan yang dilakukan dan dampak terhadap muatan kebijakan itu sendiri.

Kebijakan pada dasarnya merupakan ketentuan-ketentuan yang harus dijadikan pedoman, pegangan atau petunjuk bagi setiap usaha dan kegiatan dari aparatur pemerintah/pegawai. Kebijakan dengan demikian mencakup keseluruhan petunjuk organisasi. Dengan kata lain, kebijakan adalah hasil keputusan manajemen puncak yang dibuat dengan hati-hati yang intinya berupa tujuan-tujuan, prinsip-prinsip dan aturan-aturan yang mengarahkan organisasi melangkah ke masa depan. Secara ringkas ditegaskan bahwa hakikat kebijakan sebagai petunjuk dalam organisasi.

Kebijakan publik adalah hasil pengambilan keputusan oleh manajemen puncak baik berupa tujuan, prinsip,

maupun aturan yang berkaitan dengan hal-hal strategis untuk mengarahkan manajer dan personel dalam menentukan masa depan organisasi yang berimplikasi bagi kehidupan masyarakat. Suatu kebijakan publik yang telah diterima dan disahkan (*adapted*) tidaklah akan ada artinya apabila tidak dilaksanakan. Untuk itu implementasi kebijakan publik haruslah berhasil, malahan tidak hanya implementasinya saja yang berhasil, akan tetapi tujuan (*goal*) yang terkandung dalam kebijakan publik itu haruslah tercapai yaitu terpenuhinya kepentingan masyarakat (*public inters*).

Kebijakan publik adalah sebagai kebijakan yang dibuat oleh badan-badan pemerintah dan para aktor politik yang bertujuan untuk menyelesaikan masalah publik. Menurut Dye (Subarsono:2008:2) kebijakan publik adalah apapun pilihan pemerintah untuk melakukan atau tidak melakukan. Dari pendapat diatas dijelaskan bahwa kebijakan publik mencakup sesuatu yang tidak dilakukan oleh pemerintah disamping yang dilakukan oleh pemerintah ketika pemerintah menghadapi suatu masalah publik.

Suatu kebijakan yang telah diterima dan disahkan tidaklah akan ada artinya apabila tidak dilaksanakan. Menurut Merilee S. Grindle (Nugroho 2003:174) isi dari kebijakan mencakup :

1. kepentingan yang terpengaruhi oleh kebijakan,
2. jenis manfaat yang akan dihasilkan
3. derajat perubahan yang diinginkan ,

4. kedudukan pembuat kebijakan,
 5. (siapa) pelaksana program,
 6. Sumberdaya yang dikerahkan,
- Sementara itu konteks implementasinya adalah :

1. kekuasaan, kepentingan dan strategi actor yang terlibat
2. karakteristik lembaga dan penguasa
3. kepatuhan dan daya tanggap

Kebijakan itu merupakan rumusan suatu tindakan yang dikembangkan dan diputuskan oleh instansi atau pejabat pemerintah guna mengatasi atau mempertahankan suatu kondisi.

Kebijakan dibuat oleh pemerintah untuk mengatur kehidupan masyarakat. Salah satu program pemerintah Kabupaten Lingga dalam mengurangi angka kemiskinan adalah merumuskan program pemberdayaan masyarakat.

Dalam program pemberdayaan tersebut tentunya memiliki peraturan yang mengatur tentang ketentuan umum, maksud dan tujuan program ini dilaksanakan di Kabupaten Lingga, Prinsip, Kriteria, organisasi pelaksana, wewenang, standar pelaksanaan, lokasi sasaran, mekanisme, hingga pendanaan dan pengawasan yang dilakukan dalam pelaksanaan program.

2. Evaluasi Kebijakan

Ripley dan Franklin (dalam Winarno, 2012:145) berpendapat bahwa Evaluasi adalah apa yang terjadi setelah undang-undang ditetapkan yang memberikan otoritas program, kebijakan, keuntungan dan benefit. Sementara itu, Grindle (dalam

Winarno 2012:146) juga memberikan pandangannya tentang Evaluasi dengan mengatakan bahwa secara umum, tugas evaluasi adalah membentuk suatu kaitan yang memudahkan tujuan-tujuan kebijakan bisa direalisasikan sebagai dampak dari suatu kegiatan Pemerintah.

Nugroho (2004:186) mengatakan evaluasi kebijakan publik memiliki empat fungsi, yaitu:

1. Eksplanasi. Melalui evaluasi dapat dipotret realitas pelaksanaan program dan dapat dibuat suatu generalisasi tentang pola-pola hubungan antar berbagai dimensi realitas yang diamatinya. Dari evaluasi ini evaluator dapat mengidentifikasi masalah, kondisi, dan aktor yang mendukung keberhasilan atau kegagalan kebijakan.
2. Kepatuhan. Melalui evaluasi dapat diketahui apakah tindakan yang dilakukan oleh para pelaku, baik birokrasi maupun pelaku lainnya sesuai dengan standar dan prosedur yang ditetapkan oleh kebijakan.
3. Audit. Melalui evaluasi dapat diketahui, apakah *output* benar-benar sampai ketangan kelompok sasaran kebijakan, atau justru ada kebocoran atau penyimpangan.
4. Akunting. Dengan evaluasi dapat diketahui apa akibat sosial ekonomi dari kebijakan tersebut.

Evaluasi memberi informasi yang valid dan dapat dipercaya mengenai kinerja kebijakan, yaitu seberapa jauh kebutuhan,

nilai dan kesempatan telah dapat dicapai melalui tindakan publik. Evaluasi sangat berperan dalam nilai-nilai suatu tujuan dan target yang telah ditetapkan. Menurut Nawawi (2006:73) “Evaluasi kinerja diartikan juga sebagai kegiatan mengukur/menilai pelaksanaan pekerjaan untuk menetapkan sukses atau gagalnya seorang pekerja dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawab dibidang kerjanya masing-masing”.

Dye (dalam Winarno:2012:235) ada tiga hal yang dapat dilakukan evaluator dalam mengevaluasi kebijakan publik:

1. Evaluasi kebijakan menjelaskan keluaran-keluaran kebijakan seperti pekerjaan, uang, materi yang dihasilkan, dan pelayanan yang disediakan. Keluaran ini merupakan hasil yang nyata dari adanya kebijakan.
2. Evaluasi kebijakan mengenai kemampuan kebijakan dalam memperbaiki masalah-masalah sosial.
3. Evaluasi kebijakan mengenai konsekuensi-konsekuensi kebijakan dalam bentuk *policy feedback* termasuk didalamnya adalah reaksi dan tindakan-tindakan pemerintah dalam sistem pembuatan kebijakan dalam beberapa pembuat keputusan.

Dunn (2003:610) menggambarkan kriteria-kriteria evaluasi kebijakan bahwa:

1. Efektivitas : Berkenaan dengan apakah program/kebijakan tersebut mencapai hasil (akibat) yang

diharapkan, atau mencapai tujuan dari diadakannya kegiatan-kegiatan yang dilakukan. Efektifitas, yang secara dekat berhubungan dengan rasionalitas teknis, selalu diukur dari unit produk atau layanan atau nilai moneterinya

2. Efisiensi : Berkenaan dengan jumlah usaha yang diperlukan untuk menghasilkan tingkat efektifitas tertentu. Efisiensi yang merupakan sinonim dari rasionalitas ekonomi adalah merupakan hubungan antara efektifitas dan usaha, yang terakhir umumnya diukur dari ongkos moneter.
3. Kecukupan : Berkenaan dengan seberapa jauh suatu tingkat efektifitas memuaskan kebutuhan, nilai, atau kesempatan menumbuhkan adanya masalah. Kriteria kecukupan menekankan pada kuatnya hubungan antara alternatif kebijakan dan hasil yang diharapkan
4. Perataan : Kebijakan/program tersebut dilaksanakan merata serta terpenuhinya seluruh kebutuhan.
5. Responsivitas: berkenaan dengan seberapa jauh suatu kebijakan dapat memuaskan kebutuhan, preferensi, atau nilai kelompok-kelompok masyarakat tertentu. kriteria responsivitas adalah penting karena analisis yang dapat memuaskan semua kriteria lainnya. efektifitas, efisiensi, kecukupan, kesamaan, masih gagal jika belum menanggapi

kebutuhan aktual dari kelompok yang semestinya diuntungkan dari adanya suatu kebijakan

6. Ketepatan : suatu hasil pelaksanaan yang dilihat dari kesesuaian biaya dengan standar dan bentuk surat pertanggung jawaban yang sesuai dengan ketentuan juklak dan juknis.

C. METODE PENELITIAN

Jenis Penelitian ini adalah penelitian Deskriptif kualitatif, dalam penelitian deskriptif ini, peneliti hanya memberikan suatu gambaran secara sistematis, faktual dan akurat mengenai fakta-fakta yang sesuai dengan ruang lingkup judul penelitian.

Menurut pendapat Sugiyono (2010:11) menyatakan bahwa “penelitian deskriptif adalah penelitian yang dilakukan untuk mengetahui nilai variabel mandiri, baik satu variabel atau lebih tanpa membuat perbandingan, atau menghubungkan antar variabel”.Selanjutnya bahwa penelitian deskriptif dimaksudkan untuk pengukuran yang cermat terhadap fenomena sosial tertentu, peneliti mengembangkan konsep dan menghimpun fakta, tetapi tidak melakukan pengujian hipotesa.

Lokasi Penelitian ini dilaksanakan di Desa Tanjung Lipat kecamatan Senayang Kabupaten Lingga. Adapun alasan pemilihan wilayah ini dikarenakan Nelayan merupakan salah satu pekerjaan utama penduduk desa saat ini. Jika dilihat secara umum masyarakat di Desa Tanjung lipat masih banyak yang menggunakan alat tangkap tradisional, tidak hanya itu

masyarakat nelayan juga masih berada di bawah garis kemiskinan. Hal ini diasumsikan bahwa bantuan pemerintah yang diberikan belum merata, masih ada nelayan yang belum memiliki alat-alat tangkap modern sehingga pendapatan mereka pun masih rendah.

Dalam penelitian ini menggunakan teknik *Purposive sampling*, yaitu menentukan informan secara sengaja dengan pertimbangan-pertimbangan tertentu. Jumlah informan dalam penelitian ini adalah 1 orang Pegawai Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Lingga, 1 orang Kepala Desa, 4 orang Nelayan.

Jenis data dalam penelitian ini adalah :

- a. Data Primer yaitu data yang diperoleh melalui cara menyebarkan pedoman wawancara dan melakukan wawancara secara langsung meliputi data tentang Evaluasi program motorisasi perikanan dalam pemberian bantuan untuk pemberdayaan masyarakat di kabupaten Lingga tahun 2014 (Studi kasus Pada Bantuan Mesin Robin di Desa Tanjung Lipat)
- b. Data Sekunder yaitu data yang diperoleh dengan cara membaca, mempelajari dan memahami melalui media lain yang bersumber dari literatur, buku-buku, serta dokumen.

Analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah menggunakan teori Moleong (2006:35) menyatakan analisa dan kualitatif adalah proses pengorganisasian, dan pengurutan data kedalam pola dan kategori serta satu uraian dasar, sehingga

dapat dikemukakan tema yang seperti disarankan oleh data. Adapun langkah – langkah analisa data yang dilakukan adalah : (1) menelaah dari semua data yang tersedia dari berbagai sumber. (2) reduksi data yang dilakukan dengan membuat abstraksi. (3) menyusun data kedalam satuan-satuan. (4) pengkategorian data sambil membuat koding. (5) mengadakan pemeriksaan keabsahan data, dan (6) penafsiran data secara deskripsif.

D. PEMBAHASAN

Pemberdayaan dapat diartikan sebagai perolehan kekuatan dan akses terhadap sumber daya untuk mencari nafkah. Istilah pemberdayaan sering dipakai untuk menggambarkan keadaan seperti yang diinginkan oleh individu, dalam keadaan tersebut masing-masing individu mempunyai pilihan dan kontrol pada semua aspek kehidupannya. Pemberdayaan masyarakat pada dasarnya merupakan upaya yang dilakukan oleh pemerintah untuk meningkatkan atau memperbaiki kemampuan, pengetahuan masyarakat dalam menjalankan kehidupannya untuk menjadi lebih baik. pemberdayaan masyarakat nelayan juga merupakan salah satu hal yang harus diperhatikan oleh pemerintah mengingat banyaknya masyarakat yang berprofesi sebagai nelayan hidup dengan keadaan ekonomi yang tergolong ekonomi lemah.

Pemerintah Kabupaten Lingga mengusahakan program modernisasi armada dan alat penangkapan ikan yaitu dengan

pengentasan perahu layar sehingga nelayan berangsur-angsur mengganti penggunaan perahu dengan mesin robin, dengan demikian jangkauan operasi penangkapan menjadi lebih jauh sehingga akan berkorelasi positif terhadap peningkatan hasil tangkapan ikan. Program modernisasi armada dan alat penangkapan ini didukung dengan pendanaan APBD untuk bantuan mesin robin serta alat tangkap long tail untuk nelayan.

Memandang pentingnya peran pemerintah dalam pemberdayaan masyarakat nelayan maka dibuatlah program bantuan mesin robin dengan tujuan meningkatkan kesejahteraan masyarakat pesisir dalam hal ini peran pemerintah dilaksanakan oleh Dinas Kelautan dan Perikanan yang menjalankan program pemberdayaan masyarakat pesisir terutama pada wilayah Desa Tanjung Lipat Kabupaten Lingga. Dalam penelitian ini penulis memberikan batasan-batasan agar bisa digunakan untuk melihat evaluasi program pemberdayaan masyarakat nelayan tersebut.

1. Efektifitas

Berkenaan dengan apakah program bantuan mesin robin tersebut mencapai hasil yang diinginkan, atau mencapai tujuan dari diadakannya program tersebut. Hal ini dapat dilihat dari indikator : Program bantuan mesin robin yang dilaksanakan dapat merubah kehidupan sosial masyarakat Nelayan. Pemberdayaan masyarakat adalah upaya untuk menciptakan/ meningkatkan kapasitas

masyarakat, baik secara individu maupun kelompok, dalam memecahkan berbagai persoalan terkait upaya peningkatan kualitas hidup, kemandirian dan kesejahteraannya. Pemberdayaan masyarakat memerlukan keterlibatan yang lebih besar dari perangkat pemerintah daerah serta berbagai pihak untuk memberikan kesempatan dan menjamin keberlanjutan berbagai hasil yang dicapai. Salah satu tujuan dari program pemberdayaan masyarakat adalah merubah kehidupan sosial masyarakat miskin. Untuk mengetahui apakah program yang dilaksanakan dapat merubah kehidupan sosial masyarakat.

Berdasarkan hasil wawancara dengan informan dilapangan maka peneliti dapat menarik kesimpulan bahwa bantuan ini belum dapat merubah kehidupan sosial para nelayan hanya meringankan beban jarak tempuh saja. Kehidupan sosial adalah kehidupan yang di dalamnya terdapat unsur-unsur sosial/kemasyarakatan. Sebuah kehidupan disebut sebagai kehidupan sosial jika di sana ada interaksi antara individu satu dengan individu lainnya, dan dengan terjadinya komunikasi yang kemudian berkembang menjadi saling membutuhkan kepada sesama. Dalam hal yang terjadi di lapangan, kehidupan sosial sangat erat kaitannya dengan bagaimana bentuk kehidupan itu berjalan di kalangan masyarakat.

Untuk mengetahui adanya perubahan kehidupan sosial peneliti telah melakukan penelian dengan hasil wawancara, bahwa

kehidupan sosial masyarakat tidak dapat langsung berubah seiring dengan adanya program bantuan mesin robin ini. memang perlu dilakukan perubahan sosial di masyarakat yang nantinya akan menjadi suatu penguatan sosial dalam usaha memberdayakan masyarakat miskin yang ada di daerahnya. Penggunaan istilah pemberdayaan terkait dengan penguatan ketidakberdayaan masyarakat miskin, masyarakat diberdayakan dengan memanfaatkan pengetahuan dan kearifan lokal agar menjadi subyek dalam pembangunan, mandiri, mampu menolong dirinya sendiri, serta mengembangkan semangat kepercayaan diri masyarakat setempat.

2. Efisiensi.

Berkenaan dengan jumlah usaha yang diperlukan agar program bantuan mesin robin ini dapat berjalan sesuai sebagaimana mestinya. Hal ini dapat dilihat dari indikator Kegiatan yang dilakukan oleh pemerintah dalam penyaluran bantuan mesin robin seperti memberikan pendampingan.

Berdasarkan hasil wawancara dengan informan maka dapat dianalisa bahwa tidak ada kegiatan yang dilakukan setelah adanya penyerahan bantuan tersebut, seperti bimbingan teknis. Peningkatan kualitas sumber daya manusia merupakan upaya pemberdayaan masyarakat agar dapat meningkat kemampuan serta pengetahuan melalui sosialisasi maupun bimbingan teknis yang diberikan.

Peningkatan kualitas sumber daya manusia nelayan haruslah dilakukan oleh pemerintah agar masyarakat nelayan yang mendapatkan bantuan dari pemerintah tidak hanya mendapatkan sarana dan prasarana akan tetapi juga mendapatkan ilmu yang berguna untuk merawat alat yang sudah di berikan. Hal ini tentu saja merupakan salah satu bentuk pemberdayaan pemerintah kepada masyarakat nelayan agar dapat bekerja dan memenuhi kebutuhannya.

Berdasarkan hasil wawancara dengan informan maka dapat dianalisa bahwa dalam program ini tidak ada bimbingan teknis atau kegiatan lainnya, pemerintah hanya memberikan bantuan mesin robin tanpa membekali masyarakat cara penggunaan dan pemasangan yang benar. karena menurut pemerintah nelayan jauh lebih memahami tentang penggunaan bantuan ini. Peningkatan kualitas sumber daya manusia melalui bimbingan teknis kepada masyarakat nelayan merupakan tahap pemberdayaan yang dilakukan pemerintah yang bertujuan agar masyarakat nelayan mendapatkan pengetahuan dalam melaksanakan pekerjaan serta mendapatkan pelajaran bagaimana untuk memelihara peralatan yang ada sebagai sarana penunjang pekerjaan.

3. Kecukupan

Berkenaan dengan seberapa jauh program ini telah dijalankan. Hal ini dapat dilihat dari indikator: Program bantuan mesin robin sudah tepat sasaran. Sasaran

yang ingin dicapai dalam Pemberdayaan Masyarakat adalah berkurangnya jumlah penduduk miskin secara bertahap, terbentuknya sistem dan kelembagaan penanggulangan kemiskinan. Dalam sebuah program hendaknya harus dilakukan dengan tepat sasaran, agar tujuan dari program tersebut dapat tercapai.

Berdasarkan hasil wawancara dengan informan maka dapat dianalisa bahwa program bantuan mesin robin selama ini sudah tepat sasaran, walaupun kenyataannya tidak dapat memenuhi semua kebutuhan nelayan didesa Tanjung lipat. Setiap program pemberdayaan masyarakat memang harus dilaksanakan sesuai dan tepat sasaran. Program pemberdayaan yang baik juga mampu memunculkan berbagai potensi khas masyarakat yang akan mempercepat proses pemberdayaan. Pembangunan jangka panjang memiliki keterkaitan erat dengan pemberdayaan masyarakat dimana pemberdayaan masyarakat merupakan suatu prasyarat utama dapat diibaratkan sebagai gerbang yang akan membawa masyarakat menuju keberlanjutan secara ekonomi, sosial dan ekologi yang dinamis. Melalui upaya pemberdayaan, masyarakat didorong agar memiliki kemampuan memanfaatkan sumberdaya yang dimilikinya secara optimal serta terlibat secara penuh dalam berbagai aspek pembangunan di wilayahnya mulai tahap perencanaan, pelaksanaan sampai

pelestarian termasuk faktor produksi, ekonomi, dan sosial budaya.

Berdasarkan hasil wawancara dengan informan maka dapat dianalisa bahwa walaupun tidak semua bantuan dirasakan oleh semua masyarakat nelayan yang ada di Desa Tanjung Lipat, namun diakui yang menerima saat ini memang sudah tepat sasaran. Dari hasil wawancara dengan informan diatas maka dapat dianalisa bahwa program bantuan mesin robin sudah berjalan tepat sasaran. Tujuan dari penanggulangan kemiskinan di Desa Tanjung Lipat adalah menurunkan jumlah penduduk miskin secara bertahap Tujuan dari penanggulangan kemiskinan ini juga untuk membebaskan dan melindungi masyarakat dari kemiskinan dalam arti luas, jadi tidak hanya mencakup upaya mengatasi ketidakmampuan untuk konsumsi dasar saja tetapi juga mewujudkan penghormatan, perlindungan dan pemenuhan hak-hak dasar masyarakat miskin lainnya seperti kesehatan, pendidikan, dan partisipasi kehidupan ekonomi, sosial, politik dan budaya secara penuh agar dapat menjalani kehidupan yang bermartabat.

4. Perataan

Program bantuan mesin robin tersebut dilaksanakan merata serta terpenuhinya seluruh kebutuhan. Hal ini dapat dilihat dari indikator : Jumlah bantuan mesin robin yang diberikan sesuai dengan pendataan yang telah dilakukan sebelumnya oleh instansi terkait. Dalam menjalankan program bantuan mesin robin

tentu mempunyai syarat-syarat tertentu, syarat yang paling penting adalah pendataan. Pendataan akan berhubungan dengan, layak atau tidaknya seseorang mendapat bantuan tersebut.

Dari hasil wawancara dengan informan diatas diketahui bahwa di Desa Tanjung Lipat jumlah mesin robin yang didapatkan belum sesuai dengan pendataan yang dilakukan pihak pemerintah desa yang berjumlah 95 nelayan. Disadari bahwa upaya mengentaskan kemiskinan tidak mudah, serta membutuhkan strategi yang terpadu, karena persoalan kemiskinan bersifat multi dimensi. Saat ini, pemerintah sedang menyusun strategi penanggulangan kemiskinan agar program-program pengentasan kemiskinan di berbagai bidang kehidupan dapat dilaksanakan secara efektif. Pemerintah juga berusaha menurunkan angka kemiskinan dengan cara membantu meringankan beban kehidupan mereka secara langsung. Atas dasar hal tersebut pemerintah merasa perlu melakukan Pendataan rumahtangga miskin yang berskala nasional. Pendataan yang pemanfaatannya ditujukan untuk keperluan yang bersifat luas, baik bagi pemerintah maupun masyarakat dan berskala nasional. Oleh sebab itu pemerintah memberikan tanggungjawab kepada Badan Pusat Statistik (BPS) untuk melakukan kegiatan pendataan rumah tangga miskin. Untuk skala kecilnya maka ada RT, RW lurah hingga pihak Kecamatan yang harus turut mendata warga yang tinggal di lingkungannya.

Dari hasil wawancara peneliti dengan informan dilapangan maka dapat dianalisa bahwa jumlah mesin robin belum sesuai dengan pendataan yang dilakukan mulai dari desa hingga instansi terkait. Tujuan pendataan keluarga dilaksanakan untuk memperoleh data Base keluarga sejahtera dan untuk mengetahui jumlah keluarga miskin yang ada di daerah Desa Tanjung Lipat ini berdasarkan variabel kemiskinan yang sudah ditetapkan oleh BPS serta membantu masyarakat agar dapat memenuhi kebutuhan dasarnya dengan adanya bantuan dari pemerintah yang diberikan kepada masyarakat miskin.

5. Responsivitas

Responsivitas berkenaan dengan seberapa jauh suatu kebijakan dapat memuaskan kebutuhan, preferensi, atau nilai kelompok-kelompok masyarakat tertentu. kriteria responsivitas adalah penting karena analisis yang dapat memuaskan semua kriteria lainnya. Kepuasan masyarakat terhadap program bantuan mesin robin. Hal ini dapat dilihat dari indikator: Adanya kepuasan masyarakat nelayan terhadap program bantuan mesin robin yang dijalankan. Program ini sudah berjalan dalam waktu yang tidak sebentar. Tentu saja diharapkan membawa banyak perubahan bagi masyarakat terutama bagi masyarakat nelayan yang miskin.

Dari hasil wawancara dengan informan dilapangan maka dapat dianalisa bahwa, program ini sudah memberikan kepuasan tersendiri bagi masyarakat nelayan.

Selama ini penanggulangan kemiskinan nelayan hanya dalam bantuan uang atau sembako saja, hadirnya program bantuan mesin robin bagi nelayan di Desa Tanjung Lipat memiliki kepuasan tersendiri bagi masyarakat. Permasalahan kemiskinan yang cukup kompleks membutuhkan intervensi semua pihak secara bersama dan terkoordinasi. Namun penanganannya selama ini cenderung parsial dan tidak berkelanjutan.

Setiap penerima bantuan mesin robin ini tentu saja memiliki pandangan yang berbeda dan kepuasan yang berbeda. Berdasarkan hal itu peneliti telah melakukan wawancara dengan informen dilapangan.

Dari hasil wawancara dengan informan maka peneliti dapat analisa bahwa tingkat kepuasan masyarakat berbeda-beda dalam program bantuan mesin robin ini. Bantuan mesin robin merupakan salah satu program pengentasan kemiskinan melalui peningkatan sarana prasarana. Berbagai masalah yang dialami oleh masyarakat miskin menunjukkan bahwa kemiskinan bersumber dari ketidakberdayaan dan ketidakmampuan masyarakat dalam memenuhi hak-hak dasar, kebijakan pembangunan yang bersifat sektoral, berjangka pendek dan parsial serta lemahnya koordinasi antar instansi dalam menjamin penghormatan, perlindungan dan pemenuhan hak-hak dasar.

6. Ketepatan

Ketepatan suatu hasil pelaksanaan yang dilihat dari kesesuaian biaya dengan

standar dan bentuk Surat Pertanggung Jawaban yang sesuai dengan ketentuan juklak dan juknis. Hal ini dapat dilihat dari indikator :

a) Adanya kesesuaian biaya yang telah dianggarkan oleh pemerintah di Kabupaten Lingga.

Untuk menjalankan program ini sangat dibutuhkan perhatian khusus pemerintah khususnya bagi pendanaan yang konsisten agar program ini tetap terus berjalan.

Berdasarkan hasil wawancara dengan informan, maka dapat dianalisa bahwa bantuan dana sesuai dengan apa yang telah dianggarkan yaitu berasal dari APBD provinsi. Sedikitnya Rp 3,2 Miliar bantuan pemerintah provinsi tahun anggaran 2014, telah dipersiapkan DKP provinsi. untuk Kabupaten Lingga sebesar 133 unit dan didesa keton mendapatkan 20 unit, Desa Tanjung Kriting mendapatkan 20 unit, Desa Mamut 16 unit, Desa kote 8 unit, Desa pekake 6 unit, Desa lanjut 6 unit, Desa Teluk 10 unit, Desa tanjung dua 6 unit, Desa Dusung Panjang 10 unit, Desa Rejai 10 unit dan didesa Tanjung lipat diberikan sebanyak 21 unit mesin robin untuk 2 kelompok. Bantuan ini hanya bagi kelompok yang mandiri serta mampu menggerakkan manajemen kelompok untuk menunjang tangkapan ikan bagi kelompok tersebut. Berbagai upaya untuk mengatasi masalah kemiskinan dan kesenjangan telah menjadi prioritas utama program-

program yang dijalankan oleh pemerintah.

Namun demikian, beberapa proyek pemerintah yang terkait dengan penanggulangan kemiskinan ternyata belum cukup mampu untuk mengatasi masalah kemiskinan tersebut. Mereka ini masih jauh dari harapan untuk dapat hidup yang sejahtera. Sudah banyak program yang digelontorkan pemerintah untuk mengatasi kemiskinan ini, namun hasilnya belum sesuai dengan yang diharapkan. Pemerintah beberapa tahun yang lalu menggulirkan bantuan mesin robin yang ditujukan kepada nelayan dengan harapan agar mereka bisa dientaskan dari kemiskinan.

b) Adanya laporan pertanggungjawaban yang sesuai dengan pelaksanaan dilapangan dari pihak terkait terhadap pelaksanaan program bantuan mesin robin.

Pemerintah memberikan tanggung jawab untuk memanfaatkan dengan sebaik-baiknya kemudian membuat laporan pertanggungjawaban sesuai dengan juklas yang ada dan dilaporkan, dan akan dilakukan pemeriksaan.

Berdasarkan hasil wawancara dengan informan maka diketahui bahwa laporan pertanggungjawaban dalam pemberian mesin ini belum pernah dilakukan. Dalam pencapaian proses merujuk dari hasil teori evaluasi dilihat kesesuaian antara pelaksanaan program dengan ketentuan yang telah ditetapkan dalam

juklak/juknis. Dalam rangka memberikan panduan terhadap pelaksanaan program bantuan mesin robin diatur lebih lanjut berkaitan dengan penggunaan, larangan penggunaan, mekanisme penyaluran sampai monitoring dan evaluasinya. Pengelola program tingkat pusat telah menerbitkan buku petunjuk pelaksanaan/ penggunaan program. Diharapkan dengan buku petunjuk pelaksanaan tersebut seluruh pengelola program dari mulai tingkat RT maupun kelurahan dalam melaksanakan program sesuai juklak/ juknis dituntut pemahaman yang baik dari Sumber Daya Manusia yang terlibat.

Berdasarkan hasil wawancara peneliti dilapangan diketahui bahwa tidak ada laporan pertanggungjawaban dalam bantuan ini. Laporan kegiatan atau laporan pertanggungjawaban adalah suatu ikhtisar tentang hal ikhwal pelaksana suatu kegiatan yang harus disampaikan oleh pembina kepada pihak yang memberi tugas sebagai pertanggungjawaban kegiatan yang berlangsung. Selain itu, laporan pertanggungjawaban juga memiliki definisi sebagai suatu dokumen tertulis yang disusun dengan tujuan memberikan laporan tentang pelaksanaan kegiatan dari suatu unit organisasi kepada unit organisasi yang lebih tinggi derajatnya.

E. PENUTUP

Berdasarkan hasil penelitian dapat menyimpulkan program motorisasi

perikanan dalam pemberian bantuan untuk pemberdayaan masyarakat oleh Pemerintah Kabupaten Lingga tahun 2014 studi pada bantuan mesin robin di Desa Tanjung Lipat sudah berjalan dengan baik hal ini dapat dilihat dari beberapa indikator yaitu:

1. Efektivitas diketahui bahwa masyarakat nelayan sudah merasa dengan bantuan mesin robin ini hanya mengurangi jarak tempuh saja namun tidak terlalu berdampak kepada penghasilan. Kehidupan sosial masyarakat tidak dapat langsung berubah walaupun adanya program bantuan mesin robin ini. Memang perlu dilakukan perubahan sosial di masyarakat yang nantinya akan menjadi suatu penguatan sosial dalam usaha memberdayakan masyarakat miskin yang ada di daerahnya.
2. Efisiensi diketahui bahwa dalam program bantuan ini tidak ada bimbingan teknis atau kegiatan lainnya, pemerintah hanya memberikan bantuan mesin robin tanpa membekali masyarakat cara penggunaan karena menurut pemerintah nelayan jauh lebih memahami tentang penggunaan bantuan ini. Peningkatan kualitas sumber daya manusia melalui bimbingan teknis kepada masyarakat nelayan merupakan tahap pemberdayaan yang dilakukan pemerintah yang bertujuan agar masyarakat nelayan mendapatkan pengetahuan dalam melaksanakan pekerjaan serta mendapatkan pelajaran

bagaimana untuk memelihara peralatan yang ada sebagai sarana penunjang pekerjaan.

3. Kecukupan diketahui bahwa program bantuan mesin robin selama ini sudah tepat sasaran, walaupun kenyataannya tidak dapat memenuhi semua kebutuhan nelayan tetapi yang menerima memang benar nelayan memenuhi kriterianya masing-masing. Setiap program pemberdayaan masyarakat memang harus dilaksanakan sesuai dan tepat sasaran. Program pemberdayaan yang baik juga mampu memunculkan berbagai potensi khas masyarakat yang akan mempercepat proses pemberdayaan. Pembangunan jangka panjang memiliki keterkaitan erat dengan pemberdayaan masyarakat dimana pemberdayaan masyarakat merupakan suatu prasyarat utama dapat diibaratkan sebagai gerbang yang akan membawa masyarakat menuju keberlanjutan secara ekonomi, sosial dan ekologi yang dinamis.
4. Perataan diketahui bahwa di Desa Tanjung Lipat jumlah mesin yang didapatkan sudah sesuai dengan pendataan yang dilakukan. Disadari bahwa upaya mengentaskan kemiskinan tidak mudah, serta membutuhkan strategi yang terpadu, karena persoalan kemiskinan bersifat multi dimensi. Saat ini, pemerintah sedang menyusun strategi penanggulangan kemiskinan agar

program-program pengentasan kemiskinan di berbagai bidang kehidupan dapat dilaksanakan secara efektif. Pemerintah juga berusaha menurunkan angka kemiskinan dengan cara membantu meringankan beban kehidupan mereka secara langsung. Atas dasar hal tersebut pemerintah merasa perlu melakukan Pendataan rumah tangga miskin yang berskala nasional. Pendataan yang pemanfaatannya ditujukan untuk keperluan yang bersifat luas, baik bagi pemerintah maupun masyarakat dan berskala nasional.

5. Responsivitas diketahui tingkat kepuasan masyarakat berbeda-beda dalam program bantuan mesin robin ini. Bantuan mesin robin merupakan salah satu program pengentasan kemiskinan melalui peningkatan sarana prasarana. Berbagai masalah yang dialami oleh masyarakat miskin menunjukkan bahwa kemiskinan bersumber dari ketidakberdayaan dan ketidakmampuan masyarakat dalam memenuhi hak-hak dasar, kebijakan pembangunan yang bersifat sektoral, berjangka pendek dan parsial serta lemahnya koordinasi antar instansi dalam menjamin penghormatan, perlindungan dan pemenuhan hak-hak dasar.
6. Ketepatan diketahui bantuan dana sesuai dengan apa yang telah dianggarkan yaitu berasal dari APBD. Sedikitnya Rp 3,2Miliar bantuan

pemerintah daerah tahun anggaran 2014, telah dipersiapkan DKP provinsi untuk pengadaan program motorisasi perikanan ini. Bantuan ini hanya bagi kelompok yang mandiri serta mampu menggerakkan manajemen kelompok untuk menunjang tangkapan ikan bagi kelompok tersebut. Berbagai upaya untuk mengatasi masalah kemiskinan dan kesenjangan telah menjadi prioritas utama program-program yang dijalankan oleh pemerintah.

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan mengenai permasalahan program motorisasi perikanan dalam pemberian bantuan untuk pemberdayaan masyarakat oleh Pemerintah Kabupaten Lingga tahun 2014 studi pada bantuan mesin robin di Desa Tanjung Lipat, maka dapat direkomendasikan beberapa saran sebagai berikut :

1. Seharusnya pemerintah dapat memberikan jumlah bantuan sesuai dengan kebutuhan nelayan tidak hanya mesin saja tetapi beserta sampan.
2. Sebaiknya ada laporan pertanggungjawaban yang dibuat agar program ini dapat dilihat seberapa jauh hasil yang sudah dapat dilaksanakan, sehingga dapat diketahui kelemahan dan hambatan dalam pelaksanaan program ini.
3. Perlu adanya kegiatan lain dari pihak pemerintah seperti sosialisai langsung agar bantuan tersebut dimanfaatkan sebagaimana mestinya seperti bimbingan teknis yang berupa cara

merawat dan prosedur pemasangan yang benar terhadap bantuan tersebut agar bertahan lama dan tidak disalahgunakan oleh nelayan.

4. Perlu adanya bantuan yang lebih menunjang terhadap penghasilan yang didapatkan nelayan seperti jaring, bubu, alat pancing dan lain sebagainya.

DAFTAR PUSTAKA

Buku-buku

- Abidin, Said Zainal. 2002. *Kebijakan Publik Edisi Revisi*. Jakarta: Yayasan. Pancur Siwah.
- Adimihardja, dkk; 2001, *Participatory Research Appraisal dalam Pelaksanaan Pengabdian kepada Masyarakat*, Humaniora Utama Press, Bandung
- Agustino, Leo. 2006. *Dasar-dasar Kebijakan Publik*. Bandung : CV Alfabetha
- Arikunto, Suharsimi. 2006. *Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktik*. Jakarta: Rineka Cipta
- Badjuri, Abdulkahar & Yuwono, Teguh, 2002, *Kebijakan Publik Konsep & Strategi*, Undip Press, Semarang.
- Dunn, W William. 2003. *Analisa kebijakan*. Jakarta: PT. Bumi Aksara
- Dwiyanto.2009. *Kebijakan Publik Berbasis Dynamic Analisis*. Gava Media: Yogyakarta.
- Ekowati, Mas Roro Lilik, 2005, *Perencanaan, Implementasi dan Evaluasi Kebijakan atau Program*, Edisi Revisi, PT Rosdakarya, Bandung.
- Hariyoso, S. 2002. *Pembangunan.Birokrasi dan Kebijakan Publik*. Bandung: Peradaban.
- Hikmat, Harry. 2006. *Strategi Pemberdayaan Masyarakat*. Bandung : Humaniora utama pers
- Islamy, Irfan. 2009. *Prinsip-prinsip Perumusan Kebijaksanaan Negara*. Bumi Aksara: Jakarta
- Kartasasmita. 1995. *Pemberdayaan Masyarakat: Konsep Pembangunan yang berakar pada Masyarakat*, Jakarta: Bappenas.
- Keban, Yeremias. T. 2004. *Enam Dimensi Strategis Administrasi Publik, Konsep, Teori, dan Isu*. Yogyakarta. Gava Media
- Moleong, Lexy. 2006. *Metodologi Penelitian Kualitatif Edisi Revisi*.Bandung : PT. Remaja Rosdakarya
- Nawawi, Ismail. 2006. *Public Policy, Analisis,Strategi Advokasi Teori dan Praktek*. Surabaya: PMN.
- Nugroho, Riant D. 2003. *Kebijakan Publik Formulasi, Implementasi dan Formulasi*. Jakarta: PT Elex Media Komputindo.
- _____. 2004. *Kebijakan Publik Formulasi Implementasi dan Evaluasi*. Jakarta : PT.Elex Media Komputindo
- Prijono, O.S. & A.M.W. Pranarka, 1996.*Pemberdayaan: Konsep, Kebijakan dan Implementasi*. Jakarta: Center for Strategic and International Studies (CSIS).
- Ramesh.2000 *.Studying Public Policy: Policy Cycles and Policy*

- Subsystem.Oxford* : Oxford University Press.
- Satria, Arif. 2002. *Pengantar sosiologi Masyarakat Pesisir*. Jakarta : Cidesindo
- Setiawati dkk. 2007. *Pragmatik: Sebuah Perspektif Multidisipliner*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Subarsono. 2008. *Analisis Kebijakan Publik*, Yogyakarta, Pustaka Pelajar.
- Sugiyono,2010. *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif R&D*. Penerbit: Alfabeta.
- Suharno. 2010. *Dasar-Dasar Kebijakan Publik*. UNY Press.
- Sulistiyani, Ambar Teguh, 2004. *Kemitraan dan Modul-modul Pemberdayaan*. Yogyakarta: Gava Media.
- Sumaryadi, I Nyoman. 2005. *Efektivitas Implementasi Kebijakan Otonomi Daerah*. Jakarta : Citra Utama
- Sutrisno.2005.*Manajemen Keuangan Teori, Konsep, dan Aplikasi*.Yogyakarta : Ekonisi
- Syafarudin. 2008. *Efectivitas Kebijakan Pendidikan*. Jakarta: PT. Rineka Cipta
- Tangkilisan, Hesel Nogi. 2003. *Implementasi Kebijakan Publik*. Yogyakarta: Lukman.
- Wahab, Solichin. 2002. *Analisis Kebijaksanaan, Dari Formulasi Ke Implementasi Kebijaksanaan Negara*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Winarno, Budi. 2012. *Kebijakan Publik, Teori dan Proses*. Jakarta: PT. Buku Kita.
- Widodo. Joko. 2013. *Analisis Kebijakan Publik*. Malang : Bayumedia
- Peraturan Perundang-undangan :**
- Peraturan Menteri Kelautan Dan Perikanan Republik Indonesia Nomor Per. 12 /men/2008 tentang bantuan langsung masyarakat bidang kelautan dan perikanan
- Peraturan daerah Provinsi kepulauan Riau nomor 4 Tahun 2011 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRD dan Dinas daerah Provinsi Kepulauan Riau
- Jurnal :**
- Heriyanto.2013.Evaluasi Program Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Pesisir.Jurnal Kebijakan Publik, Volume 4, Nomor 1, Maret 2013, hlm. 1-118
- Michele Sipahelut. 2010. Analisis Pemberdayaan Masyarakat Nelayan Di Kecamatan Tobelo Kabupaten Halmahera Utara. Sekolah Pascasarjana Institut Pertanian Bogor : Bogor
- Tridoyo Kusumastanto, Yudi Wahyudin. 2012. Pembinaan Nelayan Sebagai Ujung Tombak Pembangunan Perikanan Nasional (*Fishermen Capacity Building as a Spearhead of the National Fisheries Development*).
<https://www.researchgate.net/publication>